

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI DENGAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Auliza Oktari¹⁾, Agus Solikhin²⁾, Dahmiri³⁾*

¹⁾Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

^{2,3)}Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Jambi

Email : Chaauliza3@gmail.com¹⁾, agussolikhin@unja.ac.id²⁾, dahmiri@unja.ac.id³⁾*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi dengan Kompetensi Pegawai sebagai Variabel Mediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah yang ada di Kota Jambi. Sementara itu, sampel dari penelitian ini adalah 180 responden pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan analisis kausalitas SEM (Structural Equation Modeling) berbasis component atau variance yang terkenal dengan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pegawai, Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai, Kompetensi pegawai memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai, serta Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan Daerah, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pemerintah

Abstract

This research aims to understand and analyze the Impact of Accountability and Financial Management Transparency on the Performance of Jambi City Government with Employee Competence as a Mediating Variable. The population in this study consists of all employees of the Regional Financial Agency in Jambi City. Meanwhile, the sample of this study is 180 respondents who are employees of the Regional Financial Agency of Jambi Province. The analysis used in this study includes descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis using SEM (Structural Equation Modeling) causality analysis based on component or variance, known as Partial Least Square (PLS). This research provides the following results: Accountability positively affects the Regional Financial Performance of Jambi City government, Accountability has a positive and significant effect on employee competence, Transparency does not affect the Regional Financial Performance of Jambi City government, Transparency has a positive and significant effect on employee competence, Employee competence has a positive and significant effect on the Regional Financial Performance of Jambi City government,

Accountability positively affects the Regional Financial Performance of Jambi City government mediated by employee competence, and Transparency has a positive significant effect on the Regional Financial Performance of Jambi City government mediated by employee competence.

Keywords: Accountability, Transparency, Regional Finance, Employee Competency Government Performance

1. LATAR BELAKANG

Di Provinsi Jambi, otonomi daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi yang berisi tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya yang mencakup mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam (Bappeda Jambi, 2023)

(Sugista, 2019) mengatakan bahwa *Good Governance* dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. *Good Governance* memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dari semua indikator tersebut, hal yang paling penting dalam *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi antara lain *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency dan effectiveness, serta accountability.*

Konsep *Good Governance* atau tata kelola yang baik dapat terwujud apabila terdapat tanggung jawab (akuntabilitas), transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Daerah yang bersangkutan. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative.*

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Hastoro & Sunardi, 2021)

Prinsip Akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Firmansyah & Rahmawati, 2020). Fenomena korupsi di dalam pemerintah daerah dapat sangat merugikan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Upaya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah bagian penting

dari fenomena kinerja pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk menghindarinya adalah dengan menciptakan lingkungan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat mencerminkan kinerja mereka. Kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya adalah bagian dari evaluasi ini. Pemerintah daerah yang mengadopsi inovasi dan teknologi dalam administrasi publik mereka dapat meningkatkan efisiensi dan keterlayanan pelayanan publik. Ini mencakup penerapan e-government, sistem informasi geografis (SIG), dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Disisi lain, hal ini juga berkaitan dengan keterkaitan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah serta menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah yang mendorong partisipasi masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan membangun dukungan yang lebih besar dari warganya. Sehingga, hal ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola yang baik adalah tata kelola yang mengedepankan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaannya (Haliah et al., 2023)

Kompetensi pegawai memainkan peran penting dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketika pegawai memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas mereka, hal ini mendukung transparansi dengan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada pemahaman yang kuat. Selain itu, kompetensi yang tinggi juga memperkuat akuntabilitas karena pegawai yang kompeten lebih cenderung bertanggung jawab atas tindakan mereka (Harits, 2019)

Penelitian (Ghanem & Castelli, 2019) di Kanada yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis Kompetensi Pegawai. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Demirag & Khadaroo, 2011) di UK dan penelitian (Natria et al., 2022) di Indonesia. Disisi lain, penelitian (Pramudyawardhani & Munari, 2023) pada penelitiannya di Surabaya yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Pegawai pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Indriasih & Sulistyowati, 2022) di Cirebon, Indonesia. Kemudian, penelitian (Yudin & Utami, 2020) di Indonesia yang menyatakan bahwa Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Medan terutama Kinerja Keuangan Daerah. penelitian lain yang berkaitan dengan hal ini antaranya juga dilakukan oleh (Hardiningsih et al., 2020) di Indonesia serta (Ghanem & Castelli, 2019) di Kanada

Pemahaman terhadap fenomena-fenomena yang telah dipaparkan ini, diantaranya berupa tata kelola berbasis layanan masyarakat yang penuh akuntabilitas dan transparan. Serta disisi lain dapat menciptakan lingkungan Pemda yang bekerja secara jujur dengan kompetensi pegawai yang kapabel. Hal ini dianggap dapat membantu analisis dan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah agar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. (Siswanto, 2019). Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2019) : Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (directing), Pemotivasian (motivating), Pengendalian (controlling)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Secara umum terdapat lima (5) prinsip dalam GCG menurut KNKG (2019) yang disingkat TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.

Otonomi Daerah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Berakhirnya Orde Baru menuntut reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun 2019 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Glosary Word Bank dikemukakan bahwa desentralisasi adalah “*A process of transferring responsibility, authority, and accountability for specific or broad management function to lower levels withinan organization, system or program*“. Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ataupun luas kepada aras yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2020) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo, 2022).

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Iqbal et al., 2021).

Transparansi

Menurut Annisaningrum (2022) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan suatu informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil dari kinerja dalam suatu organisasi. Dengan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengetahui seluruh rencana kerja kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat

memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (Damayanti, 2021).

Kinerja

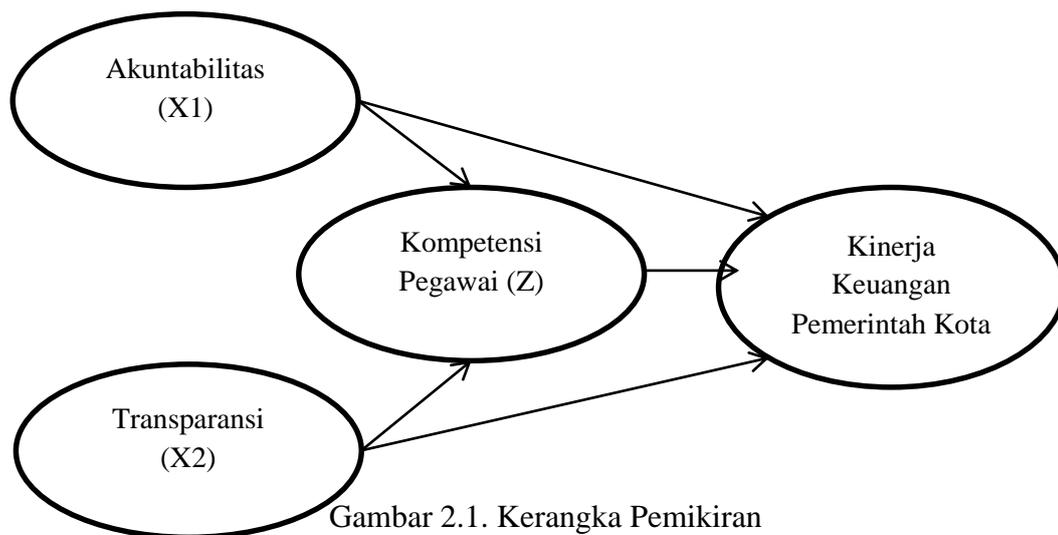
Menurut Mahsun (2019) kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2022). Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kompetensi Pegawai

Kompetensi merupakan pondasi dalam mengelola sumber daya manusia, (Telha, 2021). Kompetensi memiliki hubungan langsung dengan kinerja perusahaan (Kabir Ibrahim & Shah, 2019). Keterampilan kewirausahaan berpengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan (Isaac et al., 2021); dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) merupakan bagian 6 kompetensi yang sangat penting untuk keberlanjutan kewirausahaan (Ploum, et al., 2021). Kompetensi diperlukan setiap pengusaha untuk belajar untuk berhasil menciptakan masa depan yang lebih dinamis (Harini et al., 2020).

Kerangka Pemikiran

Berikut ditampilkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Hipotesis

- H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi
- H2: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kompetensi Pegawai
- H3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi.:
- H4: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kompetensi Pegawai
- H5: Kompetensi Pegawai Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Kota Jambi.
- H6: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Berpengaruh Positif terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai

H7: Transparansi pengelolaan keuangan daerah Berpengaruh Positif terhadap kinerja pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh Kompetensi Pegawai

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian berjenis Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Penelitian kuantitatif yang digunakan bersifat eksplanatoris (*explanatory research*). Sedangkan cakupan eksplanasinya, merupakan penelitian kausalitas.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah yang ada di Kota Jambi yaitu sebanyak 315 pegawai yang terdiri dari 207 pegawai laki laki dan 108 pegawai perempuan.

Dalam menentukan jumlah sampel yang representatif adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Ferdinand, 2019). Jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah: Sampel minimum = Jumlah indikator x 10, karena indikator penelitian ini berjumlah 18, maka sampel dari penelitian ini adalah = $18 \times 10 = 180$ responden pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data observasi lapangan dengan cara menyebarkan open kuesioner. Jenis data merupakan data primer. Menurut (Sugiyono 2021) kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sementara data sekunder berasal dari buku dan website yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk dapat dijadikan pedoman dalam penelitian.

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2019), metode deskriptif adalah metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat kecenderungan penilaian responden terhadap pernyataan yang diberikan. Terlebih dahulu dibuat suatu batas kelas yang digunakan untuk memutuskan apakah nilai rata-rata dapat masuk dalam kategori jawaban. Pada penelitian ini analisis deskriptif menggunakan microsoft excel.

Analisis Statistik Inferensial

Pada penelitian ini analisis data menggunakan Statistik inferensial dalam penelitian ini menggunakan analisis kausalitas SEM (*Structural Equation Modeling*) berbasis *component* atau *variance* yang terkenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini menggunakan software SmartPLS 3.

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi landasan teori dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, hubungan antara indikator dan variabel seluruhnya bersifat reflektif. Hal ini didasarkan karena indikator-indikator pada masing-masing variabel tersebut berasal dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan penggunaan angka skala likert. Untuk mengukur secara kuantitatif pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi digunakan alat analisis Structural Equation Model (SEM) Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Smart PLS 3.0. SEM berbasis co-variance, SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks. Selain itu PLS tidak membutuhkan banyak asumsi, data tidak terdistribusi normal.

Menurut (Ghozali, 2020) menyebutkan model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai outer model dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dilakukan secara reflektive convergent validity dan discriminial indicator pembentuk konstruk laten dan composite reliability serta cronbach alpha untuk nilai indikatornya. Sedangkan evaluasi model atau inner model untuk memprediksi hubungan antar variabel laten.

4. HASIL DAN PENELITIAN

Hasil Measurement Model (Outer Model/ Pengujian Indikator)

Convergent validity dari *measurement model* dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstraknya. Korelasi ini didefinisikan sebagai *loading factor (outer loading)*. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2019). Dalam penelitian ini, batas nilai *loading factor* yang ditetapkan adalah nilai *loading factor* di atas 0,5.

Berdasarkan gambar 5.2. terlihat bahwa seluruh indikator telah memiliki nilai diatas 0,5. Hal ini berarti semua indikator tersebut telah valid dan merupakan refleksi dari masing-masing variabel penelitian ini.

Seluruh indikator telah memiliki *outer loading* di atas 0,5. Oleh karena itu, indikator yang ditampilkan pada model 2 adalah indikator yang valid dan reliabel sebagai indikator yang merefleksikan variabel penelitian ini.

Convergent validity dari pengujian indikator (*measurement model*) tidak hanya dapat dilihat dari nilai *loading factor* tetapi dapat juga dilihat dari hasil *calculate* terhadap model ke dua berupa hasil *Average Variance Extracted* dan *Composite Reliability*. Berikut ditampilkan tabel *Average Variance Extracted* dan *Composite Reliability*:

Tabel 1. Composite Reliability dan AVE

	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas (X1)	0,871	0,693
Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,846	0,525
Kompetensi Pegawai (Z)	0,822	0,438
Transparansi (X2)	0,825	0,541

Sumber: Output PLS

Berdasarkan tabel 5.2 maka dapat dilihat bahwa nilai composite reability dari seluruh variabel sudah berada diatas 0,7, sementara terdapat 1 nilai AVE yaitu kompetensi pegawai yang memiliki indikator dibawah 0,5. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan

bahwa indikator dari masing-masing variabel telah reliabel dan valid merefleksikan variabelnya masing-masing.

Hasil Pengujian Structural Model (Inner Model)

Tahapan pengujian structural model (*inner model*) dengan memperhatikan nilai *R-square* yang merupakan hasil uji *goodness-fit* model. Nilai *R-square* dapat dilihat di dalam tabel *R-square* dari hasil *running calculate* model. Berikut tabel R Square dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,830	0,828
Kompetensi Pegawai (Z)	0,644	0,640

Sumber: Output PLS

Nilai R-Square yang telah diketahui dari masing-masing variabel maka dilakukan perhitungan dan formulasi untuk menentukan nilai predictive-relevance sebagai berikut:

$$Q2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2)$$

$$Q2 = 1 - (1 - 0,830) (1 - 0,644)$$

$$Q2 = 1 - (0,170) * (0,356)$$

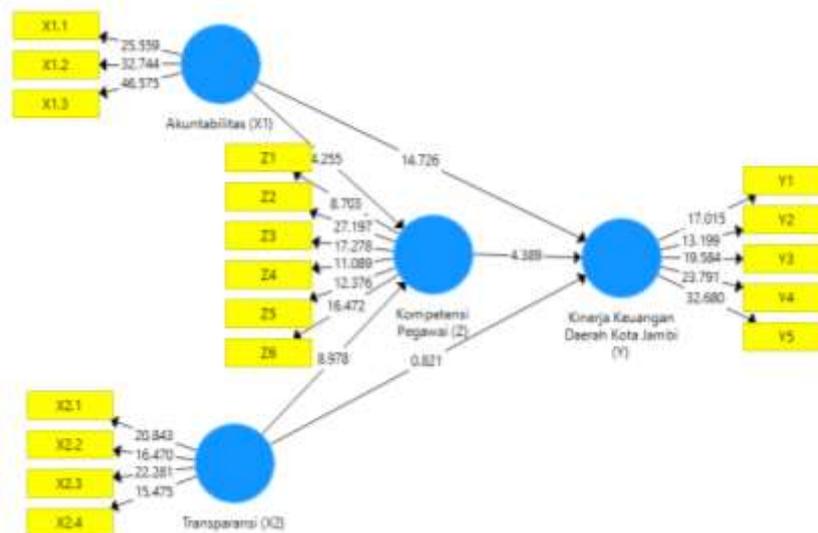
$$Q2 = 1 - 0,06052$$

$$Q2 = 0,93948$$

Pada perhitungan nilai nilai relevansi prediktif yang diperoleh adalah sekitar 93,948%, menunjukkan seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh model ini. Persentase yang tidak dijelaskan, yaitu sekitar 6,052%, disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model atau kesalahan pengukuran

Hasil Pengujian Hipotesis (Variabel)

Selanjutnya akan melakukan pengujian bootstrapping terhadap model penelitian untuk menemukan hasil pengujian hipotesis dan hasilnya ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Bootstrapping

Hasil pengujian antar variabel atau hipotesis dalam penelitian ini diperoleh dari hasil *running bootstrapping*. Pada hasil *running bootstrapping* juga memunculkan tabel *result for outer loadings*. Berikut hasil path coefficient dari model penelitian ini:

Tabel 3 Tabel Result for Outer Loading

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas (X1) -> Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,678	0,677	0,046	14,726	0,000
Akuntabilitas (X1) -> Kompetensi Pegawai (Z)	0,302	0,297	0,071	4,255	0,000
Kompetensi Pegawai (Z) -> Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,249	0,249	0,057	4,389	0,000
Transparansi (X2) -> Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,051	0,052	0,062	0,821	0,412
Transparansi (X2) -> Kompetensi Pegawai (Z)	0,558	0,567	0,062	8,978	0,000

Sumber: Output PLS

Berikut ditampilkan pula uji tidak langsung:

Tabel 4. Spesific Indirect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas (X1) -> Kompetensi Pegawai (Z) -> Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,075	0,074	0,024	3,155	0,002
Transparansi (X2) -> Kompetensi Pegawai (Z) -> Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi (Y)	0,139	0,142	0,038	3,677	0,000

Sumber: Output PLS

Berdasarkan gambar 5.4 pengaruh antar variabel dan tingkat signifikansi masing-masing dapat dilihat melalui kolom *original sample estimate* dan kolom *t statistics*. Nilai *t-stat* yang berada diatas nilai 1,96 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari masing-masing hipotesis Ghozali (2019). Hasil pengujian hipotesis adalah. sebagai berikut:

1. Hasil t-statistik ini menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan **terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama**. Sehingga memiliki arti bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.
2. Hasil t-statistik menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi pegawai. Dengan demikian, **terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua ini**. Hal ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pegawai.
3. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tidak ada bukti empiris yang cukup untuk menerima hipotesis keempat. Ini mengindikasikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.
4. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari transparansi terhadap kompetensi pegawai. Dengan demikian, terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kelima, yang berarti transparansi berpengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai.
5. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil tersebut, ada bukti empiris yang kuat untuk menerima hipotesis ketiga, yang berarti kompetensi pegawai memiliki

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.

6. Ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai secara signifikan memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa melalui peningkatan kompetensi pegawai, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.
7. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai secara signifikan memediasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ini menunjukkan adanya bukti empiris yang cukup untuk menyatakan bahwa transparansi, melalui peningkatan kompetensi pegawai, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi

Berdasarkan hasil juga dapat diidentifikasi bahwa dalam variabel Akuntabilitas (X1), indikator 'Output dan outcome yang terukur' (X1.3) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, menandakan pentingnya hasil yang terukur dalam praktik akuntabilitas. Nilai t-statistik yang tinggi untuk indikator ini menegaskan bahwa adanya hasil kerja yang nyata dan dapat diukur merupakan faktor yang paling krusial dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah.

Untuk variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y), indikator 'Kepuasan' (Y5) muncul sebagai yang paling responsif terhadap praktik akuntabilitas, dengan nilai t-statistik tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan adalah aspek terpenting dari Kinerja Keuangan Daerah yang dipengaruhi oleh Akuntabilitas.

Analisis ini menyimpulkan bahwa 'Output dan outcome yang terukur' (X1.3) dari Akuntabilitas memegang peran kunci dalam memproyeksikan peningkatan 'Kepuasan' (Y5) terhadap pelayanan pemerintah daerah. Ketika Akuntabilitas berfokus pada pencapaian hasil yang spesifik dan terukur, hal ini secara langsung meningkatkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintah, yang tercermin dalam tingkat kepuasan mereka.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kewo (2019) di Indonesia, Han dan Hong (2019) di Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan suatu instansi.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kompetensi Pegawai Kota Jambi

Dalam konteks pengaruh Akuntabilitas terhadap Kompetensi Pegawai, indikator 'Output dan outcome yang terukur' (X1.3) ditemukan sebagai faktor dengan pengaruh tertinggi dalam Akuntabilitas. Dengan nilai t-statistik yang signifikan, ini menandakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan dan mengukur output dan outcome merupakan unsur kunci dari Akuntabilitas yang berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai.

Dari sisi Kompetensi Pegawai, 'Kesempatan' (Z3) menjadi indikator dengan pengaruh tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk pengembangan karier dan pertumbuhan profesional adalah aspek yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kompetensi pegawai sebagai hasil dari Akuntabilitas yang ditingkatkan.

Analisis data menunjukkan hubungan yang signifikan antara 'Output dan outcome yang terukur' (X1.3) dalam praktik Akuntabilitas dan 'Kesempatan' (Z3) dalam peningkatan Kompetensi Pegawai. Dengan kata lain, fokus pada hasil yang terukur dari Akuntabilitas memotivasi pegawai untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kompetensi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai cenderung

merespons positif terhadap lingkungan kerja yang mendorong transparansi hasil dan menawarkan ruang untuk pengembangan pribadi dan profesional.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dhani dan Munari (2023). Mereka menyatakan bahwa Akuntabilitas yang dilakukan oleh HR pada BPKAD setempat dianggap mampu meningkatkan kinerja pegawai yang berada disana. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ghaneem (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mampu meningkatkan kompetensi moral pegawai

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Jambi. Diperlukan langkah komprehensif yang mencakup hal lainnya untuk mencapai peningkatan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kosack (2022) di Seattle, USA dan Novatiani (2020) yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja pemerintah yang bersangkutan. Kinerja pemerintah ini dapat berupa kinerja secara umum maupun kinerja keuangan

Pengaruh Transparansi Terhadap Kompetensi Pegawai

Hubungan antara 'Informasi yang memadai' (X2.3) dalam Transparansi dengan 'Kesempatan' (Z3) dalam Kompetensi Pegawai mengindikasikan bahwa lingkungan kerja yang transparan berkontribusi langsung terhadap penciptaan dan pemanfaatan kesempatan pengembangan bagi pegawai. Ini mencerminkan bahwa transparansi tidak hanya penting untuk akuntabilitas dan kepercayaan publik tetapi juga esensial untuk memotivasi pegawai dan meningkatkan kapasitas mereka.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pramudyawardhani dan Munari (2023) pada BPKAD Surabaya. Mereka menyatakan bahwa transparansi mampu meningkatkan kinerja pegawai BPKAD yang ada di Surabaya.

Pengaruh Kompetensi Pegawai Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi

Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan pegawai adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah. Ini mengindikasikan bahwa kompetensi pegawai tidak hanya penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi internal tetapi juga untuk memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardianto dan Hermanto (2019). Mereka menyatakan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pegawai yang berkompeten mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah karena kepuasan masyarakat sebagai indikatornya.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Yang Dimediasi Oleh Kompetensi Pegawai

Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai pilar dasar untuk pengelolaan keuangan yang baik tetapi juga sebagai katalisator untuk pembangunan kapasitas internal. Dengan menetapkan standar yang jelas untuk output dan outcome yang terukur, organisasi memberikan landasan yang kokoh bagi pegawai untuk memahami ekspektasi dari mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana pegawai merasa bahwa ada nilai nyata dan pengakuan terhadap kontribusi mereka. Sebagai respons, mereka termotivasi untuk memanfaatkan setiap 'Kesempatan' yang diberikan untuk pengembangan diri, yang pada gilirannya meningkatkan kompetensi mereka.

Kinerja Keuangan Daerah yang lebih baik, ditandai dengan 'Kepuasan' masyarakat yang lebih tinggi, adalah hasil alami dari proses ini. Ketika masyarakat melihat bahwa

dana publik dikelola dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan efektif, kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah meningkat. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah tetapi juga mendukung pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2023) dan Kewo (2019). Mereka menyatakan bahwa akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja keuangan yang dimediasi oleh kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Kompetensi Pegawai, dan Kinerja Keuangan Daerah adalah elemen yang saling terkait dan saling menguatkan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai

Dalam menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai, transparansi khususnya melalui 'Informasi yang memadai' (X2.3) sebagai indikator transparansi yang paling signifikan, bertindak sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan dan kejelasan dalam operasi pemerintahan. Transparansi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan memperjelas tanggung jawab tetapi juga memberikan landasan bagi pegawai untuk memahami dengan lebih baik konteks dan tujuan dari pekerjaan mereka.

Fokus pada 'Kesempatan' (Z3) sebagai aspek kunci dalam kompetensi pegawai, transparansi memfasilitasi lingkungan kerja di mana pegawai merasa lebih dihargai dan dipercaya, mendorong mereka untuk meningkatkan kompetensi dan mengambil inisiatif lebih lanjut dalam pekerjaan mereka. Transparansi ini memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri dan untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja individu dan kolektif mereka.

Ketika kompetensi pegawai meningkat sebagai hasil dari lingkungan kerja yang transparan, dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah menjadi signifikan. Pegawai yang lebih kompeten dan well-informed cenderung mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan alokasi dan penggunaan dana publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang tercermin dalam peningkatan Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2023), Wardiana & Hermanto (2019) dan Kewo (2019). Mereka menyatakan bahwa kompetensi pegawai mampu memediasi pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga antara transparansi, kompetensi pegawai dan kinerja keuangan daerah memiliki hubungan yang berkaitan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pegawai.
3. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi.
4. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai

5. Kompetensi pegawai memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi
6. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai
7. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Jambi yang dimediasi oleh kompetensi pegawai.

Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kota Jambi telah mengidentifikasi beberapa langkah strategis. Pertama, pentingnya membangun fondasi akuntabilitas yang kuat tidak bisa diremehkan. Ini bukan hanya tentang menjaga integritas anggaran, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap sen yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi nilai tambah kepada masyarakat. Kedua, pengembangan kompetensi pegawai merupakan kunci untuk mengakselerasi kinerja keuangan daerah. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pendidikan, pegawai akan lebih mumpuni dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Terakhir, transparansi dalam pengelolaan keuangan harus diperkuat. Dengan membuka akses informasi kepada publik, pemerintah Kota Jambi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mempromosikan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui implementasi dari ketiga aspek ini, diharapkan Kota Jambi dapat mencapai tingkat kinerja keuangan yang optimal dan sustainable.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, penelitian ini memberikan peluang munculnya penelitian berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus tidak hanya pada akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi pegawai sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Penting untuk menggali lebih dalam dan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lain yang mungkin berkontribusi, seperti sistem pengawasan internal, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang cara meningkatkan kinerja keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, R. (2023). the Influence of Employee Professionalism and Competence in Improving the Quality of Employee Service One Stop Integrated Services, Kembangan District, West Jakarta Administrative City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 1–11. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3246>
- Demirag, I., & Khadaroo, I. (2011). Accountability and value for money: A theoretical framework for the relationship in public-private partnerships. *Journal of Management and Governance*, 15(2), 271–296. <https://doi.org/10.1007/s10997-009-9109-6>
- Ferdinand, agusty. (2020). *Metode Penelitian Manajemen*. Universitas diponegoro semarang.
- Firmansyah, I. encep, & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. *Competitive*, 15(1), 60–74. <https://doi.org/10.36618/competitive.v15i1.678>
- Ghanem, K., & Castelli, P. (2019). Accountability and Moral Competence Promote Ethical Leadership. *Journal of Values-Based Leadership*, 12(1). <https://doi.org/10.22543/0733.121.1247>

- Ghozali, I. (2020). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Universitas diponegoro semarang.
- Haliah, Rante, M. I., & Kusumawati. (2023). PERFORMANCE MEASUREMENT USING VALUE FOR MONEY OF GOVERNANCE IN INDONESIA. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(3), 113–122.
- Han, Y., & Hong, S. (2019). The Impact of Accountability on Organizational Performance in the U.S. Federal Government: The Moderating Role of Autonomy. *Review of Public Personnel Administration*, 39(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682816>
- Harini, S., Gemina, D., & Yuningsih, E. (2020). Leveraging smes performance of sustainability: Creativity and innovation based on hr competency and market potential in the era of ir 4.0. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(1).
- Harits, B. (2019). The influence of employee competency towards employee performance on finance and regional asset management agency in Bandung City, Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(20), 455–462.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2021). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. *AKURAT /Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 18–34.
- Kewo, C. L. (2019). International Journal of Economics and Financial Issues The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293–297. <http://www.econjournals.com>
- Natria, D., Samian, & Riantoputra, C. D. (2022). Employee accountability in Indonesia: The role of formalization, managerial monitoring behavior and perceived competence. *PLoS ONE*, 17(12 December), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278330>
- Pramudyawardhani, M., & Munari, M. (2023). the Influence of Transparency, Accountability, Supervision, and Hr Competence on Apbd Management At Bpkad Surabaya City. *International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*, 3(2), 409–422. <https://doi.org/10.53067/ije3.v3i2>
- Sugista, R. A. (2019). Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, 01, 18.
- Yudin, J., & Utami, W. (2020). The Effects of External Pressure, Management Commitment, and Human Resources Competence on Financial Reporting Transparency (Study on Regional Work Unit Tangerang District). *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 5(7), 370–379. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2020.v05i07.001>